

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Hayati (2017), pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan merupakan suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih baik. Menurut Fadly (2013), upaya dalam pembangunan daerah akan dimanfaatkan aspek-aspek yang secara ekonomi berpotensi untuk dapat dikembangkan. Potensi ekonomi dalam kerangka pembangunan daerah dapat diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan di bidang ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk membangun daerah tersebut. Suatu proses pembangunan tidak terjadi begitu saja, tetapi harus diciptakan melalui intervensi pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan yang akan mendorong terciptanya suatu proses pembangunan.

Peran pemerintah dalam pembangunan daerah meliputi : (1) Entrepreneur yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha bisnis. (2) Koordinator yaitu pemerintah daerah dapat melakukan tindakan sebagai koordinator dalam menetapkan ataupun mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. (3) Fasilitator yaitu pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku ataupun budaya masyarakat) di suatu daerah. (4) Stimulator yaitu pemerintah daerah dapat menstimulasi pengembangan dan penciptaan suatu usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah itu dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut (Deddy, 2000).

Pembangunan Infrastruktur adalah aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang baik disuatu daerah akan menjamin efisiensi, meningkatkan nilai tambah perekonomian dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Tersedianya infrastruktur adalah salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan produktivitas di suatu daerah. Infrastruktur dapat diartikan

sebagai roda dari penggerak ekonomi. Dari alokasi pembiayaan swasta dan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan daerah dan nasional. Secara ekonomi mikro ketersediaan pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya suatu barang produksi. Namun dalam konteks ekonomi makro tersedianya jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya *marginal productivity of private capital*. Infrastruktur juga sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia diantaranya peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses terhadap lapangan kerja mudah, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan kemakmuran nyata, serta terwujudnya stabilitas makro ekonomi. Seperti keberadaan infrastruktur jalan yang baik akan mampu memberikan akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Begitu pula dengan tersedianya pasar dapat membantu dalam menumbuhkan perekonomian. (Abdul Haris, 2002).

Menurut Fadli (2013), daerah otonom adalah kewenangan daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan bagi masyarakat setempat menurut prakarsa tersendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah tersebut mencakupi seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, peradilan, politik, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Menurut BPS Kabupaten Bireuen (2018), Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten Bireuen sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000, Bireuen dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Geografis Kabupaten Bireuen memiliki kisaran luas sekitar 179.632 Ha atau 1.796,32 Km² atau 3,16% dari luas wilayah provinsi Aceh, luas lahan sawah 128,971 Ha sedangkan luas hutan dan perairan sebesar 66.516,5 Ha. Sejak berdirinya Kabupaten Bireuen sudah terjadinya perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam bidang pemerintahan, infrastruktur bahkan pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor terutama di sektor pertanian yang memberikan sumbangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tertinggi dari sektor lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2010-2019

No	Tahun	PDRB Total (Tahun)	Laju Pertumbuhan (%)	PDRB Pertanian (Tahun)	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	2010	2.654.641,6	1,80	830.747,7	2,00
2	2011	7.397.629,8	3,80	2.454.615,4	3,12
3	2012	7.689.706,3	3,95	2.518.474,5	2,60
4	2013	7.999.503,7	4,03	2.584.308,5	2,61
5	2014	8.171.310,7	2,15	2.566.955,1	-0,67
6	2015	8.473.559,8	3,70	2.662.379,9	3,72
7	2016	8.824.935,9	4,04	2.748.478,9	3,16
8	2017	9.197.930,5	4,23	2.840.759,0	3,36
9	2018	9.586.141,5	4,22	2.917.977,1	2,72
10	2019	10.065.327,7	5,00	3.043.425,3	4,30

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Tabel 1 menunjukkan jumlah PDRB ADHK Kabupaten Bireuen menurut lapangan usaha (juta rupiah) dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Pertumbuhan PDRB pertanian tertinggi terdapat pada tahun 2019 mencapai sebesar 3.043.425,3 dan terendah terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 830.747,7. Pertumbuhan PDRB pertanian dari tahun 2010 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. PDRB pada sektor pertanian yang paling dominan yaitu dari subsektor tanaman pangan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 31,67 persen disusul tanaman hortikultura sebesar 23,93 persen dan peternakan sebesar 21,87 persen dari seluruh nilai tambah subkategori (BPS Kabupaten Bireuen, 2014-2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi baik berupa barang dan jasa dalam suatu daerah tertentu (BPS Indonesia, 2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola hasil Sumber Daya Alamnya (SDA), oleh sebab itu besaran-besaran PDRB yang dihasilkan di setiap daerah sangat tergantung pada potensi SDA (Sumber Daya Alam) serta faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada besaran PDRB yang bervariasi antar daerah (Sukirno, 2013). Dampak yang diberikan dari keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan berdampak pada besaran PDRB yang dihasilkan. Adanya ketersediaan faktor produksi yang baik dapat membantu dalam meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sangat erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di suatu daerah dikarenakan infrastruktur adalah aspek terpenting yaitu sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, tanpa didukung infrastruktur yang memadai pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak akan optimal.

Selama kurun waktu 2010-2019, peningkatan infrastruktur jalan pada tahun 2010 hanya sepanjang 876,86 Km dan mengalami peningkatan menjadi 1207,68 Km pada tahun 2019. Namun peningkatan infrastruktur tidak hanya terjadi pada jalan saja tetapi infrastruktur

pasar juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 10 unit kemudian sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 55 unit (BPS Kabupaten Bireuen, 2020). Infrastruktur irigasi dari tahun 2010 sampai tahun 2019 cenderung stagnan, hal ini dikarenakan mengacu pada Permen PU-PR No. 14/PRT/M/2015 sehingga jumlahnya masih sama dan tidak adanya penambahan daerah irigasi baru di lapangan. Data untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Panjang Jalan, Jumlah Pasar dan Irigasi Di Kabupaten Bireuen Tahun 2010-2019

No	Tahun	Jalan (Km)	Pasar (Unit)	Irigasi (Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2010	876,86	10	71
2	2011	876,86	20	71
3	2012	876,86	25	71
4	2013	875,61	30	71
5	2014	878,00	40	71
6	2015	891,91	45	71
7	2016	936,63	50	71
8	2017	1027,67	52	71
9	2018	1207,67	54	71
10	2019	1207,68	55	71

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Tabel 2 menunjukkan panjang jalan, jumlah pasar dan irigasi di Kabupaten Bireuen. Dalam kurun waktu 2010-2019 panjang jalan di Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan. Namun ada beberapa tahun yang stagnan tidak mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan tidak adanya pengalokasian anggaran dan dianggap non prioritas untuk dibangun. Adanya

peningkatan infrastruktur jalan ini dikarenakan adanya pengalokasian anggaran dari APBA, APBK dan APBN serta dianggap ruas skala prioritas yang harus dibangun pada tahun tersebut. Adapun jumlah pasar dalam kurun waktu 2010-2019 juga mengalami peningkatan. Namun dari segi infrastruktur irigasi tidak adanya peningkatan dari kurun waktu 2010-2019. Infrastruktur jalan dan pasar di Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan dari tahun 2010-2019. Menurut Statistik Daerah Kabupaten Bireuen (2019), pada tahun 2018, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bireuen adalah sepanjang 1,207.67 Km, dimana 53 persen sudah diaspal dan sementara sisanya belum diaspal dan masih berupa kerikil maupun tanah. Dari total panjang jalan 36,50 persen jalan berada dalam kondisi baik, 9,09 persen rusak dan 49,80 persen sisanya dalam kondisi rusak berat. Adapun pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2019 bertambah sepanjang 1,207.68 Km. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bireuen tahun 2018 mencapai sebesar 12,138 triliun rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 9,582 triliun rupiah. Selama periode 2017-2018 nilai PDRB baik itu ADHK dan ADHB terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi di Bireuen pada tahun 2018 tercatat sebesar 4,25 persen. Pertumbuhan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,16 persen. Adapun untuk struktur perekonomian Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 di dominasi oleh sektor pertanian yaitu mencapai 33,06 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang.

Melihat struktur perekonomian di Kabupaten Bireuen, tergambar bahwa peran sektor pertanian masih sangat dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB. Peran sektor pertanian di Kabupaten Bireuen sampai dengan tahun 2019 mencapai 33,08 persen (angka ini meningkat dari 33,06 persen pada tahun 2018). Besarnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Bireuen ternyata masih belum diikuti secara riil infrastruktur di lapangan, khususnya dalam memperlancar arus produksi di sentra-sentra pertanian. Seperti Infrastruktur jalan dari total panjang jalan 36,50 persen jalan berada dalam kondisi baik, 9,09 persen rusak dan 49,80 persen sisanya dalam kondisi rusak berat (Statistik Daerah Kabupaten Bireuen, 2019). Ini menggambarkan bahwa infrastruktur jalan dalam kondisi rusak berat lebih besar angkanya dibandingkan dengan kondisi jalan yang sudah di aspal atau baik. Infrastruktur pasar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak adanya peningkatan yang signifikan, sedangkan hasil produksi pertanian meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hasil produksi pertanian tahun 2018 sebesar 354.875,21 ton (ini meningkat dari tahun 2017 sebanyak 291.449,81 ton) sedangkan pada tahun 2019 sebesar 535.181,76 ton.

Begitupula pada infrastruktur irigasi yang hanya stagnan dari tahun 2010-2019, sedangkan untuk lahan sawah di Kabupaten Bireuen sebesar 14.532 Ha (BPS Kabupaten Bireuen, 2018). Hal ini jika tidak diimbangi dengan pembangunan infrastuktur yang memadai dalam memperlancar arus produksi pada sentra pertanian maka akan menentukan penerimaan PDRB sektor pertanian yang berimplikasi terhadap perekonomian di wilayah Kabupaten Bireuen.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur (jalan, pasar dan irigasi) terhadap pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bireuen ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur (jalan, pasar dan irigasi) terhadap pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bireuen.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan terkait pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bireuen.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan referensi dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan infrastruktur sehingga dapat mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Bireuen.